

Pengaruh Kebijakan Industrialisasi Pemerintah Hindia Belanda di Gementee Blitar Terhadap Perkebunan Kopi Karanganjat Tahun 1906-1945

Hartono¹, Enni Dwi Rahayu², Arif Setia Ramadhan³, Billy Andriansyah Sasmito⁴, M Thoriqul Mustaqim⁵
¹⁻⁵Universitas Negeri Malang
Email: hartono.aji47@gmail.com*

Received: 12 Januari 2025

Revised: 28 Januari 2025

Accepted: 4 Februari 2025

Published: 28 Februari 2025

Abstract

This research examines the influence of the Dutch East Indies Government's industrialisation policy in Gementee Blitar on Karanganjat Coffee Plantation in the period 1906-1945. A historical research approach was used to analyse primary and secondary sources, such as colonial archives, company reports, and newspaper articles. The findings show that the Dutch East Indies' industrialisation policy, based on the Decentralist Wet (1903), Agrarian Law (1870), and Sugar Law (1870), triggered economic transformation in Gementee Blitar. Rural industrialisation, particularly the plantation industry, developed rapidly in Blitar District, with a focus on the slopes of Mount Kelud and the Brantas Valley. The Karanganjat Coffee Plantation, owned by H. J Velsink, is one example that benefited from this policy. Infrastructure development, such as the Blitar-Kediri-Surabaya railway (1884), facilitated the distribution and export of robusta coffee, carnations and cloves produced by Karanganjat Coffee Plantation. This policy increased production and empowered the economy of the surrounding communities. Overall, industrialisation in Blitar, especially the plantation industry, triggered a significant transformation of the local economy. The Dutch East Indies policy, combined with infrastructure development, brought positive impacts to the regional economy, with Karanganjat Coffee Plantation as one example.

Keywords: Industrialisation, Economy, Blitar, Karanganjat Coffee Plantation.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh kebijakan industrialisasi Pemerintah Hindia Belanda di Gementee Blitar terhadap Perkebunan Kopi Karanganjat pada periode 1906-1945. Pendekatan penelitian sejarah digunakan untuk menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder, seperti arsip kolonial, laporan perusahaan, dan artikel surat kabar. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan industrialisasi Hindia Belanda, yang dilandasi Decentralist Wet (1903), UU Agraria (1870), dan UU Gula (1870), memicu transformasi ekonomi di Gementee Blitar. Industrialisasi pedesaan, khususnya industri perkebunan, berkembang pesat di Kabupaten Blitar, dengan fokus di lereng Gunung Kelud dan Lembah Brantas. Perkebunan Kopi Karanganjat, milik H. J Velsink, menjadi salah satu contoh yang diuntungkan oleh kebijakan ini. Pembangunan infrastruktur, seperti rel kereta api Blitar-Kediri-Surabaya (1884), memperlancar distribusi dan ekspor kopi robusta, aneplir, dan cengkeh yang diproduksi Perkebunan Kopi Karanganjat. Kebijakan ini meningkatkan hasil produksi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Secara keseluruhan, industrialisasi di Blitar, terutama industri perkebunan, memicu transformasi ekonomi lokal yang signifikan. Kebijakan Hindia Belanda, dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur, membawa dampak positif bagi perekonomian daerah, dengan Perkebunan Kopi Karanganjat sebagai salah satu contohnya.

Kata kunci: Industrialisasi, Ekonomi, Blitar, Kebun Kopi Karanganjat.

Copyright © 2025, *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*. All right reserved

PENDAHULUAN

Kedatangan Belanda di Indonesia khususnya di pulau Jawa tidak semata-mata hanya untuk menguasai sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, akan tetapi Belanda juga ingin menguasai tanah di pulau Jawa. Hal tersebut sangat di inginkan sekali oleh Belanda karena mereka akan menjadikan pulau Jawa sebagai daerah boneka atau koloninya. Dalam mencapai keinginannya tersebut tentunya jalan terjal banyak dilalui oleh Belanda, sebab dalam

hal ini masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pulau Jawa tidak rela tanah miliknya di rebut serta dikuasai oleh Belanda. Masyarakat pulau Jawa berjuang mati-matian dalam mempertahankan tanah miliknya, hal ini dapat terlihat pada peperangan yang terjadi antara masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pulau Jawa melawan orang-orang Belanda. Dalam peperangan tersebut tentunya pihak masyarakat pulau Jawa menggunakan alat sederhana seperti bambu runcing karena mereka belum mengenal peralatan modern. Berbeda dengan masyarakat pulau Jawa, orang-orang Belanda sudah menggunakan senjata yang canggih dalam melakukan peperangan, mereka sudah menggunakan senjata api, Dengan hal tersebut jelas terlihat bahwa kemenangan berada di pihak Belanda dan sejak saat itu mulai menjadi babak baru pemerintahan Hindia Belanda di pulau Jawa.

Pulau Jawa merupakan pulau yang sangat subur dibanding dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Hal tersebut tentunya membuat pemerintah Hindia Belanda ingin mempertahankan kekuasaannya dan mengembangkan segala potensi yang ada di pulau Jawa demi kepentingannya. Segala cara dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memajukan pulau Jawa, diantaranya yaitu pembangunan rumah orang-orang Belanda karena mereka merasa nyaman tinggal di pulau Jawa. Pemerintah Hindia Belanda juga membangun jalan raya untuk memudahkan akses mereka dalam berpergian ke antar daerah yang ada di pulau Jawa. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga membangun pabrik-pabrik untuk kepentingan kemajuan ekonomi di pulau Jawa serta pembangunan irigasi yang tentunya nanti komponen-komponen tersebut akan berdampak pada kemudahan segala aspek kehidupan.

Dalam memajukan sektor ekonomi di pulau Jawa, pemerintah Hindia Belanda tidaklah mendatangkan orang-orang dari negaranya untuk bekerja di pulau Jawa. Mereka yang di fatangkan dari Belanda ke Indonesia merupakan orang-orang yang terpilih Dan ahli dalam bidangnya seperti arsitek dalam membangun rumah, irigasi, maupun taman. Selebihnya pekerjaan berat seperti menjadi kuli merupakan tugas dari masyarakat pribumi, hal tersebut bukan tanpa sebab. Karena pemerintah Hindia Belanda berpikir bahwa uang yang di keluarkan tentunya jauh lebih sedikit dan sangat murah ketika mempekerjakan masyarakat pribumi. Namun dalam kenyataannya, kas pemerintah Hindia Belanda yang ada di pulau Jawa mengalami penurunan drastis karena pengeluaran mereka sangat banyak sekali dalam membiayai peperangan, khususnya peperangan yang terjadi di pulau Jawa. Dengan keadaan tersebut, pemerintah Hindia Belanda melakukan cara baru yaitu mempekerjakan masyarakat pribumi dengan cara tidak dibayar sedikitpun serta waktu dalam bekerja pun juga mengalami penambahan sehingga dalam keadaan tersebut banyak sekali masyarakat pribumi yang mati, baik karena faktor kelaparam, kelelahan, maupun karena sakit.

Namun dengan demikian, semenjak kedatangan dan adanya pemerintahan Hindia Belanda di pulau Jawa banyak masyarakat pribumi yang mengenal hal-hal baru seperti tata cara penanaman yang baik dan juga tanaman yang laku di pasar Eropa. Dalam mengatasi permasalahannya tersebut, pihak Belanda melakukan penanaman besar-besaran di pulau Jawa sehingga nanti hasilnya dapat menutupi kas pemerintahan yang kosong dan juga mengembalikan kestabilan ekonomi di negara Belanda. Sering berjalannya waktu, keadaan tersebut sudah mengembalikan ekonomi di negara Belanda menjadi lebih baik dan bahkan lebih dari cukup. Akan tetapi di pihak Indonesia, khususnya masyarakat pulau Jawa atau pribumi sangat mengalami kemunduran. Mereka yang bekerja tidak mendapatkan upah sepeser pun dan malah janji yang untuk memberikan beberapa persen hasil panen kepada

petani merupakan suatu omong kosong belaka. Belanda tidak henti-hentinya menguras seluruh kekuatan yang ada di pulau Jawa yang meliputi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, hal tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa Belanda banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang tentunya sangat menguntungkan mereka serta di sisi yang lain sangat merugikan bagi masyarakat pribumi.

Kebijakan otonomi regional yang berjuang di departemen Hindia Timur Belanda dari sejumlah besar populasi Belanda (dan Eropa) di lebih banyak kota besar di India Timur Belanda. Otonomi hibah sebenarnya untuk kepentingan penduduk Eropa, terutama Belanda. Pembebasan Decentralist Wet pada tahun 1903 menjadi penanda munculnya pemerintahan sebuah kota otonom yang kemudian dikenal sebagai Gemeente. Kota-kota besar ini kemudian diidentifikasi sebagai Geemente dan Batavia, Cornelius (Jatingara), Sebagian besar kota yang dikenal sebagai Bogor, Surabaya, Blitar, Pekalongan, Magelang, Kediri, Bandung, Malang, dan beberapa kota lainnya adalah ibu kota karisidenan Selatan, dengan populasi masyarakat Belanda yang besar. Mereka adalah PNS, pegawai dinas perdagangan dan pekerja perkebunan. Penduduk Bumiputra awalnya dirawat oleh Pemerintah Bumiputra. Itulah mengapa ada dualisme di masyarakat. Sampai tahun 1916, tidak ada kepala negara atau walikota di kota-kota yang ditunjuk. Kewenangan untuk mengurus gemeente pada saat itu masih dipegang oleh asisten residen. Pengangkatan walikota atau burgemeester baru dilakukan pada tahun 1916.

Gemeente memiliki agensi bernama Skygate sebagai legislatif, kadang-kadang bahkan seorang eksekutif, karena dijalankan oleh walikota. Anggota Gemintrad mewakili etnis minoritas yang tinggal di kota, yaitu Rupa, Cina, orang asing Timur, dan Pumaibotras. Namun, sifat keanggotaannya tidak mencerminkan jumlah kelompok etnis. Golongan Eropa selalu mendominasi keanggotaan gemeenteraad di semua kota yang berstatus gemeente. Komite Pengarah adalah komite yang didirikan pada pertemuan pertama Majelis Jaminan. Komite yang dibentuk setiap tahun adalah Komite Keuangan (Komite Keuangan), Komisi Hukum (Komite Kebersihan), Dewan Kesehatan (Komite Kebersihan), Komite Pasar (Komite Passerby), dan Komite Teknik (Komite Teknis). Komisi stabil lainnya termasuk Komisi Pajak, Komisi Pemakaman Eropa dan Komisi Air Minum. Setiap Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi. Gamment memiliki kapasitas untuk mengelola kota yang bergerak di bidang manajemen keuangan. Salah satu hak yang diberikan adalah mengumpulkan pajak dari warga kota yang digunakan untuk membangun kota bersangkutan.

Gemeente juga diberikan hak untuk mengumpulkan dana dari usaha-usaha yang dialihkan oleh pemerintah pusat seperti pemotongan hewan, pendirian pasar, penjualan dan penyewaan rumah dan tanah, dan lain-lain. Selain diberi hak, gemeente juga diberi beban untuk melakukan perawatan, pembetulan, dan pembuatan jalan umum, jalan raya, lapangan, taman-taman, tanaman tepi jalan, pembuatan dan pemeliharaan got, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pembuatan dan pemasangan papan nama jalan, pemeliharaan kebersihan jalan raya dan penyiraman jalan, penerangan jalan, penyediaan dan pemeliharaan makan, dan bertanggung jawab terhadap kebakaran.

Gementee Blitar menjadi salah satu wilayah yang masuk ke dalam kebijakan Pemerintah Kolonial dalam bidang ekonomi yaitu industrialisasi. Pemerintah Kolonial menerapkan peraturan komprehensif dengan menyediakan beberapa sarana dan prasarana seperti kantor-kantor pemerintahan, stasiun kereta api, gardu induk listrik, gereja, kebon raja (taman kota), rumah sakit, sekolah, penataan kota pembangunan akses transportasi seperti jalan, kemudian

ada irigasi dan simbol-simbol kota lainnya. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, kehidupan masyarakat pun juga mengalami berbagai perubahan akibat pengaruh dari kebijakan tersebut. Selama kebijakan berlangsung khususnya dalam hubungan dialektik banyak terjadi proses destruktif atau proses kreatif antara Pemerintah Kolonial dengan penduduk lokal. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kolonial memusatkan perhatian pada perbaikan sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan berdasarkan tingkat pendidikan tertentu (Sasmita, 2011).

Kebijakan industrialisasi oleh Pemerintah Kolonial dilatarbelakangi oleh penerapan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870 oleh kaum liberal di Parlemen Negeri Belanda sehingga menyebabkan meluasnya pengaruh liberalisme yang memunculkan perusahaan perkebunan yang salah satunya ada di Gementee Blitar, yaitu Kebun Kopi Karanganyar yang merupakan perkebunan warisan Belanda yang dibuka sejak tahun 1874 oleh H. J. Velsink, seorang pria Belanda yang memiliki nama perusahaan "Kultur Mij Karanganyar" dengan komoditas utamanya berupa tanaman kopi robusta dan anyelir.

Kebijakan Pemerintah Kolonial di Pulau Jawa memiliki dampak yang signifikan bagi tatanan kehidupan di segala bidang. Bidang sosial dan ekonomi menjadi bidang yang paling terpengaruh dari berbagai kebijakan Pemerintah Kolonial. Dampak tersebut dirasakan pula oleh masyarakat di Blitar. Pada masa inilah masyarakat pribumi mulai dikenalkan dengan uang, sistem kontrak dan ekspor (Yuliati, 2013: 102). Dampak dari adanya kebijakan Pemerintah Kolonial juga terjadi ketika diterapkan Kebijakan industrialisasi. Kebijakan industrialisasi di Blitar mengalami berbagai dinamika dalam implementasinya di lapangan (Sasmita, 2011: 3). Perusahaan-perusahaan baru yang muncul pada masa liberal ini mengalami perkembangan pesat, sehingga membutuhkan karyawan yang lebih banyak lagi. Urbanisasi ke kota dan pusat perkebunan menjadi dampak selanjutnya dari adanya kebijakan ini. Masyarakat berbondong-bondong untuk tinggal di pusat kota maupun pusat perkebunan karena dinilai sebagai wilayah yang strategis (Yuliati, 2013: 101-102).

Berbagai dinamika kebijakan Pemerintah Kolonial baik faktor, implementasi hingga dampaknya menjadi fokus dari penelitian ini. Penelitian ini akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan Gementee Blitar, Kebijakan Industrialisasi di Gementee Blitar, serta Pengaruh kebijakan tersebut terhadap Perkebunan Kopi Karanganyar. Ruang lingkup kajian ini merupakan kajian sejarah sosial ekonomi dengan lingkup temporal 1906-1942, dan lingkup spasial Gementee Blitar.

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah hasil penelitian sejarah yang menggunakan metode sejarah yang berkaitan dengan pendekatan ilmu sosial, geografi dan ekonomi. Tahapan dari metode sejarah, terdiri atas empat tahap. Pertama, mencari dan mengumpulkan sumber yang relevan penelitian ini. Kedua, kritik sumber, baik kritik ekstern maupun intern. Ketiga, interpretasi dan penarikan kesimpulan terhadap fakta dan informasi yang didapatkan. Keempat, historiografi, yakni menuliskan hasil pengkajian dan penelitian dalam bentuk artikel sejarah.

Penyajian dari hasil tersebut ditulis dan disajikan dengan penyesuaian dari berbagai pendekatan tersebut yaitu ilmu sosial terutama terwujud dari perubahan metodologi. Perubahan tersebut terjadi karena pengaruh ilmu diplomatik, dan pembaruan terpengaruh oleh ilmu sosial. Perkembangan tersebut memerlukan implikasi besar terhadap kerangka referensi yang matang secara analitis dan dapat meningkatkan kemampuan mengolah data.

Jadi, pengkajian sejarah perlu adanya metodologi dan teori. Dalam lingkup geografi bertujuan untuk kepentingan manusia. Misalnya unit-unit fisik yang dibangun untuk memuat struktural fungsional dalam berbagai sistem tertentu. Dalam konteks tersebut fungsi dan struktur tidak terlepas dari gaya hidup pada masanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Gementee Blitar Tahun 1906-1945

Sejarah kota memainkan peran penting dalam menggambarkan perubahan administrasi, terutama dalam pelayanan publik. Salah satu gejala dari perubahan ini adalah Gemeente, atau pemerintahan kota, yang merupakan lembaga yang dibentuk setelah desentralisasi. Salah satu kota yang selamat dari pergantian pemerintahan adalah Gemeente Blitar. Prasejarah penetapan Blitar sebagai Gemeente adalah keunikan kota yang bukan merupakan ibu kota tempat tinggal, melainkan telah menjadi Gemeente. Blitar adalah kota pedalaman yang terletak di lereng Gunung Kelud. Sebelum menjadi Gemeente, Pada tahun 1906 tepatnya Kota Blitar memiliki pemerintahan sendiri, tidak lagi dengan Kabupaten Blitar.

Penduduk Gemeente Blitar terdiri dari beberapa suku bangsa. Program perencanaan dan pembangunan Gemeente Blitar tahun 1911-1929 difokuskan pada pembangunan dan renovasi fasilitas umum. Gemeente belum mampu sepenuhnya membiayai dirinya sendiri di sektor keuangan. Tujuan dari program perencanaan ini adalah untuk mempercepat proses tata kota, agar masyarakat Eropa merasa nyaman tinggal di Blitar. Langkah Gemeente Blitar dalam menerapkan status Gemeente adalah hasil dari masalah lokal, seperti peraturan perpajakan, yang selalu menangani masalah kesejahteraan sosial di seluruh masyarakat, di samping kaitan desentralisasi yang mempromosikan modernisasi keberadaan modernisasi itu, yang pada akhirnya mengarah pada komersialisasi.

Gemeente Blitar terletak pada 1120 114' - 1120 28' BT dan 80 2' - 80 10' LS yang dimana hal tersebut berjarak kurang lebih 160 km dari Gemeente Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur. Daratan di Gemeente Blitar memiliki ketinggian kurang lebih 156 mdpl dengan spesifikasi sebagai berikut: utara sekitar 245 meter dengan tingkat kemiringannya 2^o-15^o, bagian tengah 175 meter, selatan 140 meter dengan tingkat kemiringan 0^o- 2^o. Dengan keadaan tersebut Gemeente Blitar dapat dikatakan sebagai wilayah dataran rendah. Suhu udara di Gemeente Blitar berkisar pada 280 sampai 290 C sehingga membuat Gemeente Blitar mempunyai iklim yang relatif sejuk. Salah satu sungai yang terkenal dari Gemeente Blitar adalah Sungai Brantas. Sungai tersebut merupakan aliran lahar dengan panjang ± 7,84 km. Meskipun demikian juga terdapat sungai kecil lain yang ada di wilayah Gemeente Blitar, yaitu kali Semut, kali Cari, kali putih, kali Urung-urung, kali Tugu, dan juga kali Gedog.

Pada tahun 1900-an air bersih merupakan kebutuhan utama bagi penduduk di Gemeente Blitar. Tidak hanya untuk tempat mandi saja, akan tetapi sungai digunakan sebagai tempat untuk mencuci pakaian dan juga kebutuhan memasak dimana dalam hal ini masyarakat Gemeente Blitar masih menggunakan luweng sebagai kompor dengan bahan bakar kayu. Meskipun demikian, pemerintah di Gemeente Blitar pada tahun 1900an menyalurkan air ke kompleks perumahan yang didalamnya merupakan tempat tinggal orang Belanda dan Eropa lainnya karena dalam hal ini kompleks perumahan terletak jauh dari sungai. Kebutuhan air tersebut diambil dari sumber air yang ada di daerah perkebunan Buluroto yang jaraknya 15 km di Timur Laut Gemeente Blitar. Kebutuhan dengan volume yang tentunya besar serta dengan kualitas sesuai kebutuhan, maka dalam hal ini pemerintah Gemeente di Blitar sudah

menggunakan pompa untuk menaikkan air. Pompa air yang besar dibangun oleh pemerintah gementee Blitar dengan perusahaan kereta api yang ada di kampung Dongki. Sementara itu pada tanggal 28 Agustus 1923 pemerintah gementee Blitar menunjuk *Bataafsche Petroleum Maatschappij* sebagai pihak yang siap bersedia mengatur penyediaan bahan bakar minyak yang ada di gementee Blitar. Akan tetapi dalam hal ini pembagian tersebut tidak merata, karena sebagian besar masyarakat asli Blitar atau pribumi tidak mempunyai cukup uang untuk mendapatkan hal tersebut. Sehingga masyarakat gementee Blitar yang tidak bisa membeli harus mencari air sendiri di sungai.

Industrialisasi di Blitar meliputi industri pedesaan dan perkotaan. Industri pedesaan berupa industri perkebunan berada di wilayah Kabupaten Blitar. Daerah subur Blitar yang menjadi pusat industri perkebunan terletak di lereng Gunung Kelud (bagian utara Blitar) di Lembah Brantas. Awalnya, ada ratusan perkebunan yang berhasil dibuat oleh orang Eropa, tetapi pada tahun 1939 ada 45 perkebunan dengan tanaman kopi, karet, kina, teh, tebu, tembakau, kapuk, singkong, kelapa, dan agave. Mereka berada di dalam kompleks perkebunan dan di tempat lain. Pembukaan perkebunan unit pengolahan memperkenalkan pola pertanian baru kepada masyarakat kepercayaan diri. Industri perkotaan yang dikembangkan di Gemeente Blitar meliputi industri jasa, industri utilitas, industri konstruksi industri pengolahan. Pelayanan meliputi pelayanan komunikasi, transportasi, hotel, pelayanan kesehatan (klinik, rumah sakit, apotek). Utilitas meliputi listrik, air bersih, dan bahan bakar. Industri konstruksi meninggalkan berbagai bangunan irigasi, jalan, jembatan, apartemen, taman kota, tempat ibadah, gedung pemerintah dan perusahaan, dan sebagainya. Industri pengolahan berupa pabrik tembakau dan minyak kelapa.

Faktor pendukung perkembangan industri Blitar antara lain bangunan dan infrastruktur yang terus ditingkatkan. Jalan desa dapat diakses ke daerah penanaman terencil. Jalan tersebut kemudian dibangun, diperlebar, dan diaspal oleh pengusaha perkebunan untuk memudahkan transportasi. Jalan raya disiapkan oleh pemerintah kolonial untuk mencapai pusat kota. Pada tahun 1923, Jalan Gemeente Blitar mampu menghubungkan wilayah di luarnya dengan kategori Jalan yang telah selesai. Perkembangan industri membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kolonial mengembangkan dan memperkuat pendidikan setelah Kebijakan Etis diterapkan pada tahun 1901. Lembaga pendidikan di Blitar berhasil dibangun oleh pemerintah swasta (Cina, bumiputera organisasi keagamaan Islam Katolik). Sampai tahun 1920-an, ada sekolah dasar (ELS, HIS, HCS) hingga sekolah menengah (MULO, Jongens Normalschool, Meisyes Leerschool), sekolah untuk calon pegawai negeri sipil bumiputera atau OSVIA di masa depan. Namun, pemerintah tidak mendirikan sekolah kejuruan yang sesuai dengan perkembangan industri di Blitar. Sekolah-sekolah ini tersedia di Malang Kediri.

Perkembangan ekonomi yang ada di gementee Blitar pada kurun waktu 1906 sampai 1945 terus menunjukkan kemajuan, salah satunya adalah pasar yang dijadikan sebagai tempat jual beli yang komplit. Masyarakat di gementee Blitar yang hidup di daerah pegunungan membawa hasil bumi seperti sayuran untuk dibawa ke pasar, sedangkan masyarakat yang tinggal di dekat laut membawa ikan untuk di jual di pasar atau ditukar dengan sayur-sayuran maupun kebutuhan lainnya seperti pakaian, hiasan maupun benda-benda lainnya. Pada tahun 1900-an pasar yang sangat terkenal di gemeente Blitar adalah pasar yang ada di daerah Pakunden, pasar Pon, serta pasar Legi. Ketiga pasar tersebut menjadi tempat pusat aktivitas

ekonomi masyarakat gemeente Blitar dalam memenuhi kebutuhan. Meskipun demikian di wilayah luar gemeente terdapat pasar yang juga cukup terkenal seperti pasar Wlingi dan juga pasar Kanigoro.

Untuk masalah transportasi gemeente Blitar telah dihubungkan dengan jalur kereta api sejak tahun 1884 dengan jalur Tulungagung – Kediri – Kertosono - Surabaya dan sebaliknya. Pada tahun 1875 proyek pembanguana jalur kereta api telah tercantum dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Staasspoorweg yang berpusat di Semarang dengan ditetapkannya Staatsblad No. 161/1875. Proyek pengembangan tersebut mencakup jurusan gemeente Blitar – Buitenzorg – Bandung - Cicalengka serta jurusan Madiun - Blitar dan sebaliknya. Pada saat itu kereta api merupakan pendukung utama masyarakat gemeente Blitar yang ingin pergi ke luar daerah dengan cepat tanpa harus berjalan kaki maupun bersepeda.

Kebijakan Industrialisasi dan Implementasinya di Gemeente Blitar Tahun 1906-1945

Perkembangan pembangunan di Gemeente Blitar menjadi jalan pembuka adanya industrialisasi. Dibangunnya sekolah-sekolah sebagai sarana perbaikan Sumber Daya Manusia, disertai dengan pembangunan jalan dan jembatan sebagai akses mobilitas produk-produk industri. Infrastruktur yang mudah dan tersedia hingga pelosok-pelosok desa menjadi faktor pendorong adanya industri di Gemeente Blitar. Selain infrastruktur jalan, pusat ekonomi dan perdagangan (pasar) juga dibangun di beberapa tempat seperti Pasar Legi dan Pasar Pon (Sasmita, 2011: 4).

Rel kereta api juga dibangun untuk mempermudah mobilisasi kegiatan ekspor dan impor produk industri. Perencanaan pembangunan rel kereta api ini telah dimulai sejak Tahun 1875 yang ditetapkan dalam Staatsblad No. 161/1875 tanggal 6 April 1875. Pembangunan rel kereta di Gemeente Blitar selesai pada tahun 1884 dan terhubung pada jalur Tulungagung, Kediri, Kertosono, hingga Surabaya. Dengan adanya moda transportasi kereta api ini, distribusi produk-produk dari industri di Gemeente Blitar menuju pelabuhan ekspor menjadi lebih mudah (Sasmita, 2011: 5).

Seiring dengan infrastruktur yang memadai, industri di Gemeente Blitar mengalami perkembangan yang signifikan. Industri di Blitar terbagi atas dua jenis yakni industri berbasis pedesaan dan industri berbasis perkotaan. Industri berbasis pedesaan dikembangkan di wilayah Kabupaten Blitar yang wilayahnya subur. Pusat industri yang dipilih adalah Lereng Gunung Kelud dan Sepanjang Aliran Sungai Brantas. Banyak perusahaan perkebunan yang berkembang di wilayah Blitar, namun yang tercatat secara resmi adalah 45 perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan tersebut mengembangkan komoditi yang bermacam-macam seperti kopi, karet, kina, teh, tebu, tembakau, singkong, kelapa dan komoditi lainnya (Sasmita, 2011: 5).

Perusahaan perkebunan tersebut menjadi magnet baru dalam masyarakat. Kemandirian dan pemberdayaan masyarakat terbangun berkat berdirinya perusahaan perkebunan tersebut. Salah satu industri berbasis pedesaan yang ada di Kabupaten Blitar hingga saat ini adalah Perusahaan Perkebunan Kopi Karanganyar (Kultur Mij Karanganyar) di bawah kepemilikan H. J Velsink. Perusahaan ini mampu menggerakkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat di sekitarnya.



Gambar 1. Kantor Perkebunan Kopi Karanganyar
(Sumber: <http://dekaranganyar.com/>)

Industri jenis kedua adalah Industri Berbasis Perkotaan yang dipusatkan di Gementee Blitar dengan fokus pada industri jasa, konstruksi, pengolahan dan sektor lainnya. Di sektor jasa meliputi jasa komunikasi, transportasi, akomodasi dan perhotelan, serta layanan kesehatan. Di bidang konstruksi berbagai sarana dikembangkan seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, perumahan, taman kota, tempat ibadah, gedung pemerintahan dan bangunan penting lainnya. Di sektor pengolahan berkembang industri pengolahan rokok dan minyak kelapa. Selain itu juga dikembangkan sektor industri pelayanan publik seperti listrik, air bersih, bahan bakar, dan lain-lain (Sasmita, 2011: 5).

Industri Komunikasi di Blitar terbilang telah memadai pada waktu itu. Pos, telegraf, telepon dan pers sudah berkembang secara masif di Blitar. Tahun 1874 Jaringan komunikasi telegraf mulai beroperasi di Blitar sebagai akses komunikasi yang dapat dijangkau masyarakat. Selang beberapa waktu tepatnya pada 1881, Pos di Blitar diresmikan dan jenis layanannya terus dikembangkan. Kantor Telegraf dan Pos berdiri satu atap di Kepanjen Kidul, Blitar. Pada 1906 di Blitar dibangun Jaringan Telepon oleh Pemerintah Kolonial dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Pers juga dibangun di Gementee Blitar karena dianggap sebagai jantung perkembangan industri. Sehingga mulai bermunculan surat kabar-surat kabar di Blitar seperti *Tjondo Birowo* (Sasmita, 2011: 6).

Sebagai kawasan industri, transportasi di Blitar juga mulai berkembang dengan berbagai mode seperti sepeda, delman (*dokar*), gerobak, bendi dan *cikar*. Mobil dan motor masih minim, dan hanya digunakan oleh para pejabat dan konglomerat. Sementara truk digunakan sebagai transportasi pengangkut barang hasil produksi. Setelah jalur kereta dari Blitar-Kediri-Kertosono hingga Surabaya terbangun, kemudian diperpanjang dengan jalur Blitar-Wlingi pada 1896 dan Wlingi-Kepanjen pada 1897. Pembangunan jalur tambahan ini merupakan permintaan dari para pengusaha Blitar Timur pada 1889. Dengan dibangunnya jalur ini, akses distribusi menjadi semakin mudah dan Blitar menjadi wilayah yang semakin strategis (Sasmita, 2011: 6).

Di Gementee Blitar berdiri tiga hotel utama yang berlokasi di pusat Kota sebagai tempat singgah para konglomerat berkelas. Di bidang kesehatan dibangun pusat layanan kesehatan untuk pribumi dan orang-orang Eropa. Pusat kesehatan untuk kelas pribumi dibangun dengan sederhana dan terbatas, dengan gedung kecil dan tenaga medis seadanya. Sementara untuk kelas Eropa dibangun dengan megah dilengkapi alat kesehatan yang komplit dan tenaga medis yang andal. Tingkat kesehatan masyarakat Blitar jika dibandingkan dengan Tulungagung dan

Trenggalek jauh lebih baik. Penyakit gondok banyak merupakan penyakit yang banyak ditemui di Blitar. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah menyediakan pusat garam beryodium dan beberapa mantri kesehatan di masing-masing kawedanan (Wlingi, Gandusari, Lodayo, Srengat) (Sasmita, 2011: 7).

Pasokan listrik di Gementee Blitar hingga kurun waktu 1923 masih kurang. Beberapa ruas jalan utama belum dialiri listrik sehingga minim penerangan. Untuk menyasiasi hal tersebut, Pada 1927 Pemerintah Gementee mengambil langkah dengan membangun penyedia Listrik tenaga diesel di desa-desa dan dioperasikan pada 1928. Tahun 1933, di Blitar didirikan gardu listrik yang dapat memasok aliran listrik dengan optimal. Sumber listrik tersebut dapat menyokong kegiatan di perumahan, klinik kesehatan, kawasan industri dan kantor pemerintah (Sasmita, 2011: 8).

Air sebagai kebutuhan utama kehidupan juga disediakan oleh Pemerintah Gementee Blitar. Pasokan air bersih itu diutamakan kepada perumahan orang-orang Eropa. Air bersih yang disalurkan bersumber dari Perkebunan Buluroto (15 km dari Pusat Gementee Blitar). Selain kebutuhan air bersih, bahan bakar juga menjadi prioritas Pemerintah. Pada 1923, Gementee Blitar memutuskan *NV Bataafsche Petroleum Maatschappij* sebagai satu-satunya perusahaan penyediaan Bahan Bakar Minyak di Blitar (Sasmita, 2011: 8).

Di Bagian konstruksi, Saluran irigasi dirancang dengan penuh pertimbangan sebagai aliran air dalam mengantisipasi banjir di Gementee Blitar. Perumahan elit yang dibangun oleh Pemerintah adalah Perumahan Bendogerit yang mengarah ke Jalan Raya Garum. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada persebaran orang-orang Eropa yang berpusat di Bendogerit. Disini perumahan elit kelas satu dibangun, disertai fasilitas umum seperti Sekolah, taman kota, gereja dan kompleks keparokian, sarana olahtaga, rumah dinas pejabat, dan tempat penting lainnya. Selain itu, Pemerintah Gementee juga mengatur kawasan pemukiman yang letaknya berdekatan dengan stasiun dan pasar. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemukiman yang kotor dan kumuh. Sebagai pelengkap juga dibangun rumah-rumah ibadah, tempat pemakamab, pemandian umum dan lapangan olahraga (Sasmita, 2011: 8).

Di tengah-tengah Gementee Blitar, Industri pengolahan minyak berdiri yang terletak di Pakunden dan Sukorejo. Selain minyak, pabrik pengolahan rokok menjadi basis utama di Gementee Blitar. Usaha kecil rumahan milik rakyat tergerus dengan pengusaha-pengusaha rokok dari China dan Belanda. Tak heran jika Blitar menjelma menjadi pusat produksi rokok pada zaman itu. Banyak *brand-brand* terkenal pada masa itu seperti rokok cap Mentjo, Tjikrak Ladang, Umpling, Bumbung, Saringan, Boket, Orong-orong, dan Baji Sutji (Sasmita, 2011: 9).



Gambar 2. Kemasan Rokok Bumbung

(Sumber: <https://www.facebook.com/1281311375319500/posts/4178664148917527/?app=fbl>)

Kebijakan industrialisasi di Gementee Blitar menjadi sebuah anugrah dan tantangan tersendiri bagi Pemerintah dan Masyarakat. Dalam perjalanannya Industrialisasi di Blitar mengalami dinamika dan pasang surut. Letak geografis Blitar di lereng Gunung berapi aktif menjadi salah satu kendalanya. Letusan Gunung Kelud 1919, menyisakan trauma mendalam bagi Blitar. Erupsi mahadasyat ini, bahkan dirasakan hingga Kota Bandung (di barat) dan Bali (di timur). Luapan material panas, banjir lahar dingin dan sapuan abu vulkanik melanda Blitar. 5160 Orang menjadi korban, ditambah dengan 15000 hektar kebun, sawah dan perkebunan yang luluh lantah. Dam Kali Bladak di Nglepok, yang menjadi pengaman Gementee Blitar-pun Jebol. Setelah letusan ini, Pemerintah menginisiasi pembuatan terowongan kawah. Proyek ini pun berlangsung selama 7 tahun dengan beberapa penghentian dan kendala (Sasmita, 2011: 10).

Industrialisasi di Blitar membawa dampak signifikan di beberapa bidang seperti Blitar menjadi daerah yang strategis, penataan ruang di semua sektor, munculnya banyak pendatang dan bertambahnya pengangguran. Selain itu seregrasi sosial (pengucilan) kepada penduduk pribumi terjadi dalam hal pendidikan, kesehatan, pemukiman. Dari awal pemberlakuannya, Industrialisasi di Blitar menjadi pro-kontra. Ada yang setuju dan mendukung kebijakan ini dengan argumentasi yang maju. Namun juga ada yang menolak karena berdampak buruk bagi kaum pribumi.

Pengaruh Kebijakan Industrialisasi Terhadap Perkebunan Kopi Karanganyar 1906-1945

Perkebunan Kopi Karanganyar (*Karanganjar Koffieplantage*) merupakan salah satu Perusahaan Perkebunan yang ada di Blitar. Perkebunan ini merupakan sebuah perusahaan yang diinisiasi dan dimiliki oleh H.J. Velsink. Perusahaan ini berdiri pada Tahun 1874 dengan nama *Kultuur Mij Karanganyar*. Komoditi utama dadi perkebunan ini adalah Kopi Robusta, Anyelir dan Cengkeh. Selain menjadi perkebunan kopi, tempat ini juga sekaligus menjadi Tempat produksi dan pengolahan kopi. Tempat ini pada masanya juga merupakan diskotik bagi elit-elit Belanda penguasa *ordernaming* di Blitar (<http://dekaranganjar.com/>).



Gambar 3. H.J Velsink bersama Istri dan Anak-Anaknya
(Sumber: <http://dekaranganjar.com/>)

Secara geografis, kebun kopi Karanganyar terletak di Dusun Karanganyar, Desa Modangan,

Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Perkebunan kopi Karanganyar ini berdiri di atas area tanah seluas 300 hektar (Pradeta dan Kurniawan, 2020: 105). Posis perkebunan yang strategis di lereng pegunungan berapi aktif menjadikan lahan perkebunan sangat subur, sehingga cocok untuk ditanami komoditi apapun, seperti kopi dan cengkeh. Berdirinya perusahaan ini berimplikasi terhadap masyarakat sekitar. Perekonomian semakin stabil dengan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar. Secara bertahap kemandirian masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya.

Industrialisasi Gemeente Blitar berdampak pada daerah, pemerintah daerah dan sosial ekonomi masyarakat. Karena Blitar merupakan daerah terbuka, maka terjalin pelayanan komunikasi dan transportasi, sehingga sangat memungkinkan untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan daerah lain dan luar negeri dengan mudah dan lancar. Jalan dan rel memungkinkan lalu lintas penumpang dan barang terus meningkat. Pemisahan sosial adalah pengucilan atau pemisahan kelompok masyarakat tertentu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Salah satunya adalah pemukiman para pekerja Perkebunan Kopi Karanganyar yang pemukimannya terketak pada daerah perkebunan dan jauh dari pusat kota.

Kebijakan industrialisasi di Blitar juga memberikan pengaruh terhadap Perkebunan Kopi Karanganyar. Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan berpengaruh kepada hasil produksi di Kebun Kopi Karanganyar. Distribusi dan ekspor produksi perkebunan semakin mudah ketika rel kereta api Blitar-Kediri-Surabaya dibangun pada 1884. Distribusi dan ekspor hasil produksi semakin meningkat ketika jalur rel kereta api sisi Blitar-Wlingi-Malang dibangun pada 1897. Pembangunan jalan di beberapa wilayah, juga membuka akses umum menuju perkebunan sehingga perkebunan semakin dikenal.

Salah satu risiko besar yang harus diterima perusahaan ini adalah ketika terjadi letusan gunung Kelud 1919. Karena berada di lereng Kelud, beberapa tanaman perkebunan dan pemukiman di kawasan pemukiman hancur diterjang material. Beruntung beberapa gedung utama yang dibangun dengan konstruksi yang baik masih kokoh berdiri seperti bangunan ikonik kantor yang ditulis menggunakan Bahasa Belanda "De Karanganyar Koffieplantage – Blitar" dan "NV. Harta Mulia" pada dinding atas bagian luar. Selain itu, di depan kantor juga terdapat keberadaan taman dengan kolam batu berbentuk bintang di tengahnya yang dinamakan Sterrentuin. Keberadaan kolam tersebut mempertegas bahwa tempat ini dulu adalah pusat pemukiman orang-orang Eropa yang tinggal di Blitar termasuk orang-orang Belanda.

Kesimpulan

Penerapan Decentralist Wet tahun 1903 membuka jalan bagi otonomi daerah di Hindia Belanda, termasuk Blitar yang menjadi Gementee (Pemerintah Kota). Kebijakan industrialisasi yang menyertainya, didorong oleh UU Agraria dan UU Gula (1870), memicu transformasi ekonomi di wilayah ini. Industrialisasi di Blitar meliputi industri pedesaan dan perkotaan. Industri pedesaan, khususnya perkebunan, berkembang pesat di Kabupaten Blitar, dengan fokus di lereng Gunung Kelud dan Lembah Brantas. Sekitar 45 perusahaan perkebunan didirikan, menghasilkan berbagai komoditas seperti kopi, karet, kina, teh, tebu, tembakau, singkong, kelapa, dan lainnya. Salah satu contohnya adalah Perusahaan Perkebunan Kopi Karanganyar (Kultur Mij Karanganyar) milik H. J Velsink, yang memproduksi kopi robusta, anyelir, dan cengkeh. Pembangunan infrastruktur masif, termasuk rel kereta api Blitar-Kediri-

Surabaya (1884), menjadi kunci kelancaran distribusi dan ekspor hasil perkebunan. Kebijakan industrialisasi ini memberikan dampak positif pada Perkebunan Kopi Karanganyar, meningkatkan hasil produksi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Secara keseluruhan, industrialisasi di Blitar, terutama industri perkebunan, menjadi bukti nyata transformasi ekonomi lokal yang didorong oleh kebijakan kolonial dan perkembangan infrastruktur. Hal ini membawa dampak positif bagi perekonomian daerah, dengan Perkebunan Kopi Karanganyar sebagai salah satu contohnya.

Daftar Rujukan

- Abdillah, S. (2019). Wisata Nostalgia di Kebun Kopi Karanganyar. (Online), (<https://jurnalfaktual.id/berita/wisata-nostalgia-di-kebun-kopi-karanganyar-blitar/>) diakses pada 21 Oktober 2021.
- Allister, Mc. (1925). *Seaport of The far East: Historical and Descriptive Commercial and Industrial Fact, Figures, and Resources second edition*. London: WHL Collingridge & Aldergate Street.
- Bisuk, Siahaan. (1996). *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir*. Jakarta: Deperindag.
- Breman, Jan (2014). *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- De Karanganyar. History De Karanganyar. (Online), (<http://dekaranganyar.com/>), diakses pada 21 Oktober 2021.
- Dick, H. (2000). "Industrialisasi di Abad ke-19: Sebuah Kesempatan yang Hilang", dalam Thomas J. Linblad (ed), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Furnivall, J.S. (2009). *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institut.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pradeta, Fandu Dyangga dan Kurniawan, Andre. 2020. The Potential Of Karanganyar Coffee Plantation Tour (De Karanganyar Koffie Plantage) As A Local Arrival Based Agroicity Area (Case Study in Dusun Karanganyar, Modangan Nglepok Village, Blitar Regency). *JOSAR*, Vol. 5 No. 2. p-ISSN: 2502-8251; e-ISSN: 2503-1155. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/josar>.
- Rahmawati, R. R. (2021). *Pengembangan media e-booklet berbasis sejarah lokal tentang pemerintahan kota blitar (1906-1945) untuk pembelajaran sejarah indonesia siswa kelas xi di ma negeri 1 kota blitar/Raisa Rahmawati* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Sasmita, N. (2011) *Industrialisasi di Gemeente Blitar, 1900-1942*. *CITRALEKHA*, Vol. XVI, No. 2, hlm. 1-18.